

**DARI PEMILU “BADUNSANAK” HINGGA PILKADAL ”BASIRAK”:  
Studi Tentang Radikalisasi Politik di Kabupaten  
Padang Pariaman 2005 <sup>1</sup>**

Oleh : Hary Efendi Iskandar, SS <sup>2</sup>

*Kalau tidak ada yang pecah  
maka pecahkanlah  
sebuah gelas, piring ataupun mangkok.  
Itu biasa dalam sebuah pesta besar  
dan di situlah muncul  
dinamika dalam konflik  
sebagai Hakikat dalam budaya Minangkabau*

**Dinamika Politik Padang Pariaman dalam Pemilu 2004**

Dengan kemarahan yang amat memuncak, *Ci Elok*<sup>3</sup>, begitulah orang memanggilnya, mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah pengurus Partai Bulan Bintang, yang juga rekan sepengurusnya. Bersamaan dengan itu, dari mulutnya mengalir lancar dan keras berbagai umpatan dan makian yang tidak enak didengar dan memerahkan kuping setiap manusia normal yang mendengarnya. Walaupun belum sempat melukai teman separtainya, parang itu sempat mengoyak-ngoyak bendera, plang nama partai, dan berbagai atribut yang terdapat di depan kantor DPC Partai Bulan Bintang Padang Pariaman di Jalan Sudirman. Setidaknya itulah gambar yang berhasil ditangkap oleh kamere Liputan 6 SCTV, Sabtu 3 Januari 2004. Penyebab utama yang membangkitkan kemarahan Ci Elok adalah penyusunan nomor urut

---

<sup>1</sup>

Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII tanggal 14-17 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta.

<sup>2</sup>

Dosen Sejarah Fakultas Sastra Unand Padang dan aktif sebagai Peneliti Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas dan menjadi penulis lepas di media nasional dan lokal.

<sup>3</sup>

Ci Elok adalah salah seorang perempuan politikus di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai seorang pemain politik, ia sudah memperlihatkan karakternya, yang bisa jadi merupakan karakter masyarakat Padang Pariaman, yaitu tidak menerima begitu saja perlakuan tidak adil yang menimpanya. Rasa ketidakadilan yang ia terima itulah yang kemudian menjadi gejala dalam dinamika politik selanjutnya di Padang Pariaman. Bahkan, dalam beberapa kali demonstrasi terhadap KPUD, Ci Elok tampil di depan sebagai kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibuat oleh KPUD. Nama Cielok yang sebenarnya adalah Hj. Suarni.

calon anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai bendaranya, Ci Elok telah banyak berkorban untuk partainya. Bahkan, ia telah mengeluarkan uang empat puluh juta rupiah lebih untuk mengembangkan partainya. Ia merasa ditindas oleh teman separtainya dan pengorbanannya selama ini tidak dihargai ketika ia ditempatkan pada nomor urut 4. Nomor urutan 1 dan 2 adalah calon yang menurutnya bukan orang yang telah berkorban untuk kepentingan partai, tetapi caleg satu dan dua adalah calon titipan dari DPW PBB Provinsi Sumatra Barat. Ia menilai telah terjadi tindakan yang tidak *fair* dalam penetapan nomor urut caleg tersebut<sup>4</sup>. Tidak adilnya penetapan caleg nomor urut 1 atau 2 itu jelas bertentangan dengan kuota 30% politisi perempuan di lembaga legislatif, seperti yang diatur dalam UU Pemilu.

Peristiwa *basiarak*<sup>5</sup> itu sontak mengagetkan masyarakat *Piaman Laweh*<sup>6</sup> khususnya serta masyarakat Sumatra Barat umumnya dan bahkan menjadi berita nasional. Betapa tidak, Pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga ke tingkat yang paling rendah sudah sejak awal mencanangkan dan mengkampanyekan pemilu damai lewat jargon *pemilu badunsanak*<sup>7</sup>. Hampir setiap spanduk yang berkaitan dengan pemilu, tidak lupa memasukkan kata *badunsanak*, dan itu terpajang di banyak tempat serta sudah menjadi slogan

---

4

Lihat *Padang Ekspres* tanggal 4 Januari 2004

<sup>5</sup> *Basiarak* itu adalah istilah local yang sering digunakan ketika terjadinya konflik, gonjang ganjing atau gaduh antar anggota masyarakat, dan atau antar kelompok masyarakat di Sumatera Barat.

<sup>6</sup> *Piaman Laweh* adalah sebutan lain Kabupaten Padang Pariaman. *Piaman Laweh* adalah Pariaman yang luas. Sebelum beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman memisahkan diri (seperti Kabupaten Mentawai) dan atau bergabung dengan Pemkot Padang, memang Kabupaten Padang Pariaman adalah kabupaten yang terluas di Sumatera Barat.

<sup>7</sup> *Pemilu Badunsanak* adalah sebuah istilah yang dipakai dalam setiap perhelatan politik di Sumatera Barat. Mulai dari pemilihan legislatif, Pilpres sampai kepada Pilkada. Konsep pemilihan badunsanak itu dipopulerkan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir konflik dalam proses politik itu. Pemilihan *badunsanak* artinya pemilihan yang didasarkan semangat persaudaraan.

pemerintah dan KPUD sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) di Sumatera Barat.

Sebagai sebuah konsekuensi dari perubahan sistem Pemilu 2004 dari *proporsional tertutup* (tidak menggunakan daftar nama caleg dan nomor urut) menjadi *proporsional terbuka* (menggunakan daftar nama caleg dan nomor urut). Hal itu tentu berdampak terhadap dinamika politik dalam pemilu. Jika pada pemilu sebelumnya persaingan tajam terjadi antara satu partai dengan partai yang lain, maka dengan sistem proporsional terbuka persaingan tajam itu menyebar antar caleg dalam satu partai. Peristiwa Ci Elok tersebut adalah salah satu bukti nyata dari sistem baru itu. Para caleg berkompetisi untuk tidak sekadar menjadi caleg, tetapi menjadi *caleg jadi*, yaitu caleg yang berada pada nomor urut satu atau dua. Andi L.Y., salah seorang caleg dari PBB dalam kasus lain, terpaksa harus menggunakan tindakan premanisme, kasar dan vulgar, seperti mengambil paksa semua berkas daftar caleg di kantor DPC PBB Padang Pariaman dan mengancam tidak akan menyerahkan berkas itu ke pihak KPUD Padang Pariaman sebelum namanya digeser menjadi caleg nomor 1<sup>8</sup>.

Tindakan premanisme dan anarkhisme berpolitik dalam pemilu itu cenderung terjadi pada partai-partai gurem, yang pengurus dan anggotanya diisi oleh orang yang tidak jelas ideologi dan visinya. Motif utamanya orang-orang seperti itu masuk partai politik adalah untuk terpilih sebagai caleg jadi. Nilai yang digunakan adalah pragmatisme, sehingga kemudian melahirkan *politisi kutu busuk* alias *politisi kutu loncat*. Agak sedikit berbeda dengan politisi yang berasal dari partai besar dan sudah mapan. Walaupun masih sama-sama sebagai politisi, perilaku politik mereka lebih halus, licin dan tidak kasar.

---

8

*Wawancara* dengan Komi Chaniago, salah seorang Pengurus PBB Padang Pariaman, Agustus 2004.

Kekuatan *money politic* telah menjadi faktor yang amat menentukan dalam mendapatkan caleg jadi, atau yang lebih luas untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan ataupun kekayaan. Dalam satu kasus misalnya, untuk mendapatkan posisi caleg nomor urut 1 atau 2, mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang bersifat fisik, tetapi menggunakan *capital power*. Kenyataan itu dapat dilihat cara berpolitiknya Golkar atau PDI-P. Calon jadi tidak hanya ditentukan oleh senioritas dan komitmen akan tetapi oleh seberapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk meredam konflik antarcaleg. Istilah yang akrab digunakan adalah uang *beli kursi*. T.S. Saamar, salah seorang caleg dari Partai Golkar, terpaksa harus menjual tanah sebagai modal untuk dapat duduk menjadi caleg nomor 1<sup>9</sup>. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh caleg menjadi daya tawar yang kuat untuk mendapatkan nomor jadi.

Besarnya biaya politik yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi caleg urutan jadi berakibat kurang baik terhadap politisi dan calon kepala daerah. Setelah hasil pemilu 2004 ditetapkan, tidak semua caleg urutan 1 atau 2 berhasil duduk menjadi anggota DPRD Padang Pariaman 2004-2009. Ditemukan beberapa kasus menarik seperti ada caleg tersebut yang mengalami stres berat dan depresi mental sehingga mengalami gangguan jiwa. Selain itu, ada juga yang berpisah dengan keluarga (bercerai). Bahkan yang tragis lagi dalam kasus Pilkada 2005, ada calon bupati yang nekat mengakiri hidupnya dengan gantung diri seperti dialami oleh Sidi Saidina Umar yang disinyalir bunuh diri akibat stres dan depresi mental akibat terkuras kekayaannya untuk melobi dan meyakinkan pihak partai politik<sup>10</sup>. Namun, dibabak akhir tidak satu

---

9

*Wawancara* dengan syafri, Tim Sukses Tuanku S. Saamar, Juli 2004.

10

Surat Kabar *Singgalang*, tanggal April 2005.

partai politik pun yang mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah. Dari 24 politik yang ikut Pemilu 2004 hanya 11 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Padang Pariaman di antaranya PNI Marhaen (1), PBB (4), PPP (4), PKS (4), Partai Demokrat (2), PKPI (1), PAN (5), PBR (1), PDIP (3), Partai Golkar (9), dan PSI (1)<sup>11</sup>.

Dari perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil pemilu legislatif 2004 terlihat bahwa Partai Golkar keluar sebagai pemenang. Jika dikaitkan dengan agenda Pilkada 2005 maka hanya Partai Golkar yang mampu memenuhi kuota 15 % sebagai syarat pencalonan pasangan kepala daerah seperti yang dipersyaratkan dalam UU. Partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang berhak mencalonkan pasangan kepala daerah tanpa berkoalisi sedangkan partai politik lainnya harus melakukan koalisi untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah<sup>12</sup>. Kuatnya posisi tawar Partai Golkar di Padang Pariaman itu merupakan satu faktor yang amat mempengaruhi *basiaraknya* pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman 2005.

### **Pemilu "Basiarak" : Radikalisasi Politik Dalam Pilkada Padang Pariaman 2005**

Telah usainya penyelenggaraan pemilu bulan Juli 2004 tidak serta merta dinamika politik lokal menurun. Dinamika politik lokal semakin hangat ketika Kabupaten Padang Pariaman termasuk salah satu dari 11 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yang secara bersamaan waktunya dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat bulan Juni 2005<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup>

Laporan KPUD Padang Pariaman, tahun 2005.

<sup>12</sup>

Lihat UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama bagian yang mengatur Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.

<sup>13</sup>

Sebelas daerah kabupaten/kota yang lainnya itu adalah: Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kabupaten 50 Kota

Untuk tingkat Propinsi Sumatera Barat misalnya, pemilihan Gubernur tidak memiliki gejala yang berarti. Kemenangan pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman dapat diterima begitu saja oleh pasangan calon gubernur yang kalah, seperti Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid, Jeffrie Geofannie-Dasman Lanin, Leonardi Harmaini-Rusdi Lubis, dan Kapitra Ampera-Dalimi Abdullah. Pada hari kedua penghitungan suara, Kapitra Ampera melalui siaran persnya dengan ringan dan tanpa beban telah mengucapkan selamat menjalankan amanah rakyat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Hanya pasangan Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid yang belum bisa menerima kekalahan. Pasangan ini tidak serta merta melemparkan *handuk putih* dalam pesta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatra Barat<sup>14</sup>. Walaupun ada gejala dalam proses pemilihan Gubernur Sumatera Barat, itu pun dalam skala yang biasa dan berupa riak kecil saja seperti ketika sekelompok *one-one*<sup>15</sup> dari Kecamatan Kuranji Padang yang menjadi basis massa Irwan Prayitno protes karena tidak dapat mempergunakan hak pilih mereka. Mereka merasa dirugikan oleh KPUD Kota Padang karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan alasan itu mereka melakukan demonstrasi ke KPUD Kota Padang. Demonstrasi yang berjalan sekitar 1 jam itu berakhir begitu saja tanpa ada sebuah keputusan dan tindakan politik sesudahnya. Meminjam istilah Scott, pola aksi yang dilakukan oleh sekelompok *one-one* itu merupakan pola dan bentuk gerakan yang dilakukan oleh orang-

---

14

Bahkan sampai sekarang Pasangan Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid tidak pernah menyatakan pengakuan atas kemenangan pasangan Gamawan Fauzi-Marlis Rahman.

15

*One-one* adalah kelompok perempuan yang setengah baya yang pada umumnya bekerja sebagai pedagang sayur dan kaki lima di Pasar Raya Padang. Pedagang sayur itu kebanyakan berasal dari Kecamatan Kuranji Padang.

orang yang kalah, yang tidak mampu menggunakan perlawanan yang lebih terencana, berskala besar dan dapat merubah keadaan<sup>16</sup>.

Berbeda dengan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman. Pilkada Kabupaten Padang Pariaman nyaris saja ditunda. Berbagai intrik politik mewarnai proses pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman (2005-2010) Dinamika dan intrik politik itu sudah mulai terasa aromanya sejak pemilu legislatif baru saja usai digelar. Dinamika politik itu semakin kencang seiring dengan dibukanya tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman oleh KPUD Padang Pariaman. Berbagai intrik politik antarcalon kepala daerah berlangsung seru, dan proses dinamika politik itu berlangsung hingga memasuki proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Tidak heran, pemilihan Bupati Padang Pariaman memunculkan sepenggal peristiwa politik yang relatif dahsyat dan dinamika politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatera Barat.

Pilkadal di daerah ini memiliki dinamika dan corak politik lokal yang khas dan memperlihatkan gejala politik yang jauh lebih dahsyat. Dinamika politik yang relatif panas itu disulut oleh beberapa peristiwa politik diantaranya tidak lolosnya pasangan M. Iqbal Abdullah-Yuliyus Danil sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Golkar dan PKS oleh KPUD Kabupaten Padang Pariaman. Keputusan KPUD Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam SK Nomor 264/KPU-PP/V-2005 tanggal 3 Mei 2005, yang telah menetapkan tiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang lulus verifikasi, diantaranya: M.Yusuf-Isril Berd; J.J Datuk Gadang-Herman Harun; Muslim Kasim-Ali Mukhni. Keputusan KPUD

---

<sup>16</sup>

James Scott, *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor, 2001

Padang Pariaman yang tidak meloloskan pasangan Iqbal Alan Abdullah-Yulius Danil disebabkan tidak lengkapnya persyaratan administrasi berupa ijazah dari Iqbal Alan Abdullah, seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 38 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum mengeluarkan keputusan itu KPUD Kabupaten Padang Pariaman telah mengirim surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratannya. Namun pasangan M.Iqbal. Abdullah-Yulius mengabaikan surat pemberitahuan itu. KPUD Kabupaten Padang Pariaman pun menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak senang dan merasa dirugikan oleh kebijakan KPUD dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum<sup>17</sup>.

Pasangan M. Iqbal-Yulius Danil dan massa pendukungnya semakin marah ketika calon *in-cambent*<sup>18</sup> Muslim Kasim yang berpasangan dengan Ali Mukhni dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi di KPUD. Menurut kelompok ini, Muslim Kasim sedang menghadapi persoalan hukum di pengadilan terkait dengan dugaan ijazah palsu<sup>19</sup>. Di samping itu, menurut mereka, pencalonan Muslim Kasim dari PAN, PDI-P dan didukung oleh Aliansi Saiyo Sakato<sup>20</sup> merupakan kebijakan yang tidak adil dan fair karena menyisakan konflik yang tajam di internal partai yang bersangkutan. Di tubuh PAN Kabupaten Padang

---

<sup>17</sup>  
2005. *Wawancara* dengan Wiryana Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, 14 November

<sup>18</sup>  
*In-Cambent* adalah calon bupati yang berasal pada periode sebelumnya (2000-2005) menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman. Dalam hal ini Muslim Kasim adalah Bupati Padang Pariaman (2000-2005) yang kembali mencalonkan diri untuk jabatan Bupati Padang Pariaman 2005-2010.

<sup>19</sup>  
<sup>20</sup> Surat Kabar *Singgalang*, tanggal 12 Juni 2005.

<sup>20</sup> Aliansi Saiyo Sakato adalah aliansi partai politik gurem di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah lebih kurang 13 partai politik, di antaranya adalah PPNUI, PPD, PNBK, PKB, PKPB, PPDI, PBSB, PDS, PIB, Partai Patriot, Partai Pelopor, PPD dan Partai Merdeka. Aliansi itu bertujuan memperkuat posisi tawar partai gurem dalam percatutan politik Pilkada.

Pariaman misalnya, dualisme kepemimpinan dan sikap politik menjadi fenomena yang menarik disimak.

Pencalonan Muslim Kasim oleh PAN Padang Pariaman mempengaruhi munculnya tarik-menarik kepentingan antara pengurus DPD PAN Kabupaten Padang Pariaman (Arif Rahman Hakim dan Andri Suandi), yang tidak mendukung pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni pada satu pihak, dengan pengurus DPW PAN Sumatra Barat plus DPP PAN (Khaidir Khatib Bandaro dan Endarmi) yang mendukung pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni pada pihak yang lain<sup>21</sup>. Kasus yang sama juga terjadi di PDI-P Padang Pariaman. Dualisme kepemimpinan dan sikap politik di tubuh PDIP Kabupaten Padang Pariaman terjadi antara kelompok Jhoni Mandai dan A. Damhuri yang mendukung pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni dengan Solfi Ardi dan Hendri yang menentang pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni dari PDIP. Bahkan kelompok Solfi Ardi dan Hendri *direstui* oleh DPP PDI-P untuk mencalonkan pasangan yang lain, yaitu pasangan Ali Arifin dan David Maldian sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-2010<sup>22</sup>.

Konflik internal partai dalam proses pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga terjadi pada PPP dan PBB. Kebijakan Sudirman Nazar selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Padang Pariaman yang mencalonkan pasangan JJ. Datuk Gadang-Herman Harun ditentang oleh

---

21

*Wawancara* dengan Darmon, Anggota DPRD Padang Pariaman dari PAN di Pariaman bulan November 2005.

22

Pemberhentian Jhon Mandai dan A. Damhuri selaku ketua dan sekretaris DPCPDIP Kabupaten Padang Pariaman didasarkan ketidakmampuannya dalam mengamankan surat Rekomendasi DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat nomor 79/IN/PLH-DPD/IV/2005 tanggal 7 April 2005, yang salah isinya mengintruksikan kepada DPC PDI-P Kabupaten Padang Pariaman untuk mengajukan Ali Arifin dan David Maldian sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman (2005-2010). Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam *Surat Rekomendasi* yang dikeluarkan oleh DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Syamsi Hasan dan Yeni. S Tangjung masing-masing sebagai ketua dan sekretaris pelaksana harian daerah (Plt) DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat tanggal 7 April 2005. Disamping itu pemberhentian Jhon Mandai dan A. Damhuri selaku Ketua dan Sekretaris karena mendukung sikap Roy BB. Janis dalam mendirikan PDI Pembaharuan ketika Kongres PDIP di Bali tahun 2004.

sebagian besar PAC PPP Kabupaten Padang Pariaman. Proses penetapan calon kepala daerah dari PPP itu tidak demokratis dan terbuka, sehingga keputusan itu merupakan kebijakan segelintir elite PPP saja<sup>23</sup>. Begitupun dengan DPC PBB Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan partai ini yang mencalonkan pasangan M. Yusuf-Isril Berd juga menyisakan konflik di internal pengurus dan anggotanya. Sikap PBB Kabupaten Padang Pariaman yang mencalonkan pasangan M. Yusuf-Isril Berd bukanlah keputusan yang demokratis dan transparan. Kelompok yang tidak mendukung keputusan partai itu bahkan mengambil sikap politik yang bertentangan dengan sikap dan kebijakan DPC PBB Kabupaten Padang Pariaman, yaitu mendukung pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni, yang bertentangan dengan sikap partai<sup>24</sup>. Hanya PKS lah yang tidak terkesan ada perpecahan di internalnya, ketika mendukung pencalonan pasangan Iqbal Alan Abdullah-Yulius Danil.

Konflik dan perpecahan di internal partai tersebut dan konflik antara partai dengan KPUD itu merupakan unsur utama yang mempengaruhi kirsuh politik Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman. Kelompok yang *kalah* atau kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil di setiap partai yang bergolak bersinergi dengan kelompok yang partai politik yang merasa dirugikan oleh kebijakan KPUD. Puncak dari koalisi kelompok kalah itu adalah munculnya aksi demonstrasi lintas partai pada tanggal 5 Mei 2005. Ratusan kader dan anggota partai politik yang berasal dari Golkar, PAN, PPP, PDIP, PBB, PKS beberapa partai gurem lainnya mendatangi Kantor KPUD Padang Pariaman.

---

<sup>23</sup>

Surat Kabar Harian *Padang Ekspres*, 4 April 2005.

<sup>24</sup>

*Wawancara* dengan Andi L. Yusra, Pengurus PBB Kabupaten Padang Pariaman, yang juga anggota DPRD Padang Pariaman (2004-2009) November 2005.

Mereka menduduki dan menyegel kantor tersebut. Dalam orasinya, para pendemo menuding KPUD Padang Pariaman telah mendapat suap dari pasangan calon tertentu untuk menyingkirkan pasangan Iqbal-Yulius Danil. Mereka menganggap KPUD tidak adil dalam penetapan calon dan akan menuntut KPUD secara hukum<sup>25</sup>. Selain menduduki dan menyegel mereka juga mencoret dinding kantor KPUD dengan cat berwarna-warni sebagai simbol keberagaman partai politik yang bergabung dalam aksi itu. Di antara coretan itu berbunyi “Awas maling, KPUD mendapat suap dari Muslim Kasim”<sup>26</sup>.

Dari keberagaman latar partai politik dalam aksi massa itu, terlihat jelas bahwa perbedaan partai politik tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk membangun koalisi dalam membangun dan memperjuangkan kepentingan. Agaknya benar apa yang dikatakan oleh Ali Abdul Wahab Wafi bahwa solidaritas primitif yang dipengaruhi rumpun setali darah, sekaum, sekaum dan sekampung amat mempengaruhi sikap dan tindakan sosial politik mereka<sup>27</sup>. Mereka akan merasa terhina jika orang kampung mereka dirugikan, dikalahkan ataupun dilecehkan oleh calon lain yang tidak ada hubungan primordial itu sehingga mereka secara tidak masuk akal akan melawan kelompok lain yang berada di luar diri mereka.

Dalam beberapa kasus lain, seperti kasus *bacakak banyak*<sup>28</sup> di pedesaan Minangkabau amat kuat dipengaruhi oleh unsur itu. Bahkan secara

---

<sup>25</sup>

Surat Kabar *Haluan*, tanggal 6 Mei 2005.

<sup>26</sup>

Surat Kabar *Padang Ekspres* tanggal 6 Mei 2005.

<sup>27</sup>

Ali Abdul Wahab Wafi, *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Grafiti Press, 1986.

<sup>28</sup>

*Bacakak banyak* adalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang dipicu oleh perselisihan antara dua kelompok masyarakat yang dilaterbelakangi oleh penguasaan terhadap aspek ekonomi, social, politik dan budaya. Untuk lebih jelasnya masalah bacakak banyak itu dapat dilihat dalam Zaiyardam Zubir, *Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya*. Padang: Penelitian Dasar Dikti, 2004.

tersurat solidaritas primitif itu terlihat jelas dalam ungkapan *Tagak kaum, babaga kaum; Tagak suku, babaga suku; Tagak kampung, babaga kampung; Tagak nagari, babaga nagari; Tagak koto, babaga koto*<sup>29</sup>. Sentimen dan solidaritas primitif itu berlangsung sampai pada tahap kampanye dan tahap pilihan politik massa terhadap calon kepala daerah. Tidak jarang muncul lembaga kesukuan, dan kedaerahan yang berlomba-lomba memberikan dukungan politik kepada calon kepala daerah yang dianggap punya hubungan *primordial*. Salah satu kasus misalnya adalah Amiruddin Uncu, salah seorang tokoh Masyarakat Padang Sago yang merupakan nagari tetangga M. Yusuf, menyatakan dukungan penuh untuk memenangkan calon ini<sup>30</sup>. Kasus lain misalnya Ikatan Keluarga Jambak Sakato (IKSJ) Padang Pariaman memberikan dukungan penuh kepada pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni, karena Muslim Kasim berasal dari suku Jambak<sup>31</sup>.

Dalam masa kampanye, solidaritas politik tidak hanya menggunakan kesamaan tali-darah, suku, kampung atau nagari tetapi *patron clien*<sup>32</sup>. Dalam melihat pola hubungan itu, setidaknya terdapat lima pola yaitu berdasarkan genetika, kharisma, ekonomi, intelektual, agama. Salah satu contohnya adalah dukungan M.Yunis, seorang elite keagamaan aliran Sattariyah<sup>33</sup> yang berpengaruh di Ulakan Tapakis yang menudukung Muslim Kasim sebagai

---

29

Pepatah itu artinya berdiri atas nama kaum, maka harus membela kaum; berdiri atas nama suku maka harus membela nama baik suku; berdiri atas nama kampung maka harus membela kampung; berdiri atas nama nagari maka masyarakatnya harus membela nagari; begitupun ketika berdiri atas nama kota, maka harus membela nama baik kota itu.

30

Lihat Surat Kabar *Haluan*, tanggal 9 Juni 2005.

31

Lihat Surat Kabar *Haluan*, tanggal 23 Juni 2005.

32

Sartono Kartodirdjo, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1984.

33

Untuk mengetahui tentang Pola dan Jaringan Sattariyah di Minangkabau lihat dalam Suryadi, *Syair Sunur; Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad 19*, Padang, PPIM, 2005.

Bupati Padang Pariaman<sup>34</sup>. Dengan demikian pernyataan ini mempengaruhi pilihan politik pemilih di daerah itu.

Kembali pada masalah konflik Pilkada pra kampanye, selain aksi massa, mereka juga melakukan gugatan dan pengaduan kepada pihak kepolisian dan pengadilan. Gugatan terhadap keputusan KPUD yang dinilai memihak pada salah satu pasang calon kepala daerah dilakukan oleh PDIP yang ditujukan kepada DPRD Padang Pariaman<sup>35</sup>. Di lain pihak, forum lintas partai juga membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada pihak kepolisian dan Panwaslih Padang Pariaman. Surat pengaduan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik itu berisi tuntutan, di antaranya meminta DPRD Padang Pariaman membubarkan KPUD Padang Pariaman dan membentuk KPUD yang baru; meminta pihak Kapolres Padang Pariaman menangkap orang yang mengatasnamakan partai politik tertentu dalam pencalonan Bupati atau calon tertentu dan mengusut tuntas penipuan, pemalsuan semua bentuk dokumen partai politik dalam mengajukan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman<sup>36</sup>. Aksi demonstrasi, gugatan, dan pengaduan itu tentu dapat menjadi alasan yang kuat bagi DPRD Padang Pariaman untuk melakukan langkah-langkah politik. Yulius Danil selaku Ketua DPRD Padang Pariaman dan sekaligus sebagai

---

<sup>34</sup>

Surat Kabar *Garda Minang*, 5 Februari 2005.

<sup>35</sup>

Ada 15 butir dasar gugatan lihat dalam *Surat Gugatan* yang ditandatangani oleh Solfi Ardi dan Hendri tanggal 20 April 2005.

<sup>36</sup>

Nama pengurus yang ikut menandatangani surat pengaduan itu adalah Usmam Foni (Ketua PKB), Asmadi (Sekretaris Parati Golkar), Faisal A. Rangkayo Majo Basa (Ketua Partai Golkar), Arif Rahman Hakim (Ketua PAN), Andri Suandi (Sekretaris PAN), Zulkarnaini (Ketua PBR), Hasan Basri (Sekretaris PBR), Dasril (Ketua PKS), Amril (Sekretaris PKS), Iskandar Bustami (PKS), Solfi Ardi (Ketua PLH PDIP), Hendri (Sekretaris PLH PDIP), Z. Datuk Bandaro Basa (Ketua PPNUI), Orpans Damrah (Ketua PPDK), Ronald (Ketua Partai Merdeka), Syahril Manan (Ketua PPIB), Zulkifli Sabata (Sekretaris PPP), Sudirman Nazar (Ketua PPP), dan Heppi Neldi (Ketua PKPI). Dari kalangan pemuda, LSM dan Ormas yang ikut menandatangani adalah Julil Fajri (Pemuda), Taslim BRT (PPP PAN), Masri Tanjung (LSM Formatif), Mustafa Kamal (LSM Ceredek), Nurhayati Kahar (LPKTPA), Binjai (LSM Limbubu), Zulkifli (PAN), Ferry Indra (PAN), Edir Asnadi (Pemuda Muhammadiyah), Sudirman (FKMD, Nofiarmen (FKMD), Asrizal Chaniago (LSM Formatif), dan Ali Amran Nur (Partai Golkar). Hal ini dapat dilihat dalam *Surat Pengaduan dan Tuntutan Para Pengurus Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman oleh KPUD Padang Pariaman*.

calon yang tersingkir mampu memanfaatkan kondisi itu untuk membalas kekealahannya, yaitu tanggal 6 Mei 2005 DPRD Padang Pariaman berhasil menggelar Rapat Paripurna Khusus tentang Pelaksanaan Pilkada Pariaman. Dari rapat itu lahir beberapa keputusan penting, di antaranya membatalkan Hasil Pleno KPUD Padang Pariaman dan membubarkan Ketua dan Anggota KPUD Padang Pariaman serta menilai bahwa semua hasil Keputusan KPUD Padang Pariaman illegal. Rapat itu melahirkan keputusan agar DPRD Padang Pariaman untuk membentuk keanggotaan KPUD Padang Pariaman yang baru dan meminta pihak kepolisian memeriksa Ketua dan Anggota KPUD Padang Pariaman, menangkap orang-orang yang telah mencalonkan pihak yang tidak direstui oleh pengurus partai, yaitu Khaidir Khatib Bandaro dan Endarmy<sup>37</sup>.

Walapun DPRD telah mengeluarkan keputusan tersebut, KPUD Padang Pariaman tetap tidak bergeming. Mereka terus melaksanakan tahapan Pilkada. Tanggal 5 Mei 2005, KPUD Padang Pariaman tetap melakukan pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut yang semulanya direncanakan di Gedung Saiyo Sakato terpaksa dipindahkan ke Kampus INS Kayu Tanam. Pemindehan dilakukan karena Hall Saiyo Sakato diduduki dan diblokade oleh demonstran yang berasal dari kelompok yang merasa dirugikan itu. Hasil mengundian akhirnya berhasil menetapkan pasangan M. Yusuf-Isril Berd berada pada nomor urut 1; JJ. Datuk Gadang-Herman Harun mengapat nomor urut 2, dan Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni pada urutan 3<sup>38</sup>. Terkait dengan desakan dari lintas partai dan DPRD Padang Pariaman tersebut, Ketua KPUD Padang Pariaman Wiryra Fansuri menegaskan KPUD Padang Pariaman siap untuk

---

<sup>37</sup>

Lihat *Notulensi Rapat Paripurna Khusus DPRD Padang Pariaman* Tanggal 6 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid (Kabag Risalah dan Rapat-Rapat), Zaimus (Kasubag Rapat dan Risalah) dan diketahui oleh Akhiardi selaku Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman.

<sup>38</sup>

*Dokumentasi Foto Pilkada Padang Pariaman Tahun 2005* oleh KPUD Padang.

menerima gugatan melalui jalur hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan hak politiknya<sup>39</sup>.

Penyelenggaraan Pilkada Padang Pariaman semakin tidak jelas, ketika Panwaslih yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara tidak sadar terseret oleh permainan elite partai politik. Ketua Panwaslih Padang Pariaman AKP Iswandi dalam suratnya menyatakan untuk memasukkan kembali pasangan Iqbal Alan Abdullah dan Yulius Danil sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2005-2010<sup>40</sup>. Akibatnya bukan meredakan malah semakin memperuncing konflik Pilkada.

Semakin tajam konflik dan pertikaian dalam Pilkada itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berinisiatif untuk memfasilitasi pertemuan mencari solusi sengketa Pilkada itu. Sudirman Gani sebagai Plt. Bupati Padang Pariaman memfasilitasi pertemuan di Kantor Bupati Padang Pariaman Tanggal 16-17 Mei 2005<sup>41</sup>. Rapat yang dihadiri oleh partai politik, KPUD, Panwaslih, Muspida dan DPRD Padang Pariaman itu bertujuan mencari titik penyelesaian dari kemelut Pilkada. Rapat yang didominasi oleh partai politik itu akhirnya berhasil mendesak KPUD dan dengan terpaksa Ketua KPUD Padang Pariaman Wiry Fansuri menandatangani pernyataan sikap Aliasi Partai Politik itu, dan

---

39

Lihat Surat kabar *Padang Ekspres*, tanggal 6 Mei 2005.

40

*Surat Saran Panwaslu Padang Pariaman* tanggal 14 Mei 2005.

41

Rapat itu dihadiri oleh Bupati Sudirman Gani, Wiry Fansuri (Ketua KPUD Padang Pariaman), Delvia Derita (Wakil Polres Padang Pariaman), dan Yuliardi (Kajari Pariaman), Dasril (Ketua PKS), Arif Rahman Hakim (Ketua DPD PAN), Faisal A, Rangkayo Basa (Ketua Golkar), Asmadi (Sekretaris Partai Golkar), Hendri (PLH Sekretaris PDIP), Solfi Ardi (Plh Ketua PDIP), Andri Suandi (Sekretaris PAN), Arpan Damrah (Ketua PPDK), Nurhayati Kahar (Ketua LSM Limbubu), Z. Datuk Bandaro Basa (Ketua PPNU), Syahril Manan (Ketua PPIB), A. Dyananhuri (Sekretaris PKB), Binjai Chan (Pers), Usman Fono (Ketua PKP), Z.M. Bagindo Kali (BKL), Edir Asnadi (PDIP), Syaiful ET (Golkar), Darmon (PAN), Zaiful (PDIP), Nasdini Indriani (PAN), Dedi Edwar (Partai Gilkar), Dahdir (PBR), Rosman (Partai Patriot), Yusalman (PAN), Nofiarman (FKMKD), Ferry Indra (LSM Bakin), Rahman R (PAN), Amrizal (LSM), Lina Marni (Tokoh Masyarakat), Yerilismen (LSM Simpatik), Jimmy C. Dt. Rangkayo Mulia (Tokoh Masyarakat), Akhiardi (Pimpinan DPRD), Basnil (PKS), Hasbillah (PAN), Muhadek Salman (Sekretaris KPUD), Jon Friadi (Wakil Ketua Panwaslih), Sugeng K (Wakil Polres Padang Pariaman), Sunardi (Kasdim 0308), dan Herman Nurman (KPN).Dapat dilihat dari *Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pilkada Padang Partiaman tanggal 16 Mei 2005*, Arsip Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Z. Datuk bagindo Kali selaku Pj. Sekretaris Dearah Kabupaten Padang Pariaman.

mengelurakan Surat Nomor 312/KPU.PP/V-2005 yang isinya pengusulan penundaan Pilkada yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Padang Pariaman dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Sumatra Barat dan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf di Jakarta<sup>42</sup>. Surat KPUD Padang Pariaman itu kemudian langsung dijawab oleh DPRD Padang Pariaman pada besok harinya tanggal 18 Mei 2005. Adapun isi surat itu antara lain: Setuju dilakukan pengunduran pelaksanaan Pilkada dan membatalkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan; mengkaji ulang kembali proses tahapan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan tututan partai politik dan pemilihan kepala daerah dapat dilanjutkan apabila permasalahan telah diselesaikan<sup>43</sup>.

Menyikapi penundaan pelaksanaan Pilkada yang digalang oleh aliansi partai politik, Panwaslih dan DPRD Padang Pariaman, Pejabat Gubernur Sumatera Barat H. Thamrin menjelaskan bahwa segala persoalan yang muncul akan diselesaikan dengan musyawarah dan dialog. Ditunda atau tidak pelaksanaan Pilkada itu sangat tergantung kepada KPUD. KPUD Padang Pariaman yang berwenang menyatakan apakah Pilkada itu diundur atau dilanjutkan. Jika KPUD Padang Pariaman menilai tidak ada alasan untuk menunda terhadap pelaksanaan Pilkada Padang Pariaman, tidak ada pihak lain di luar lembaga itu yang dapat mengambil keputusan sendiri untuk menunda Pilkada. Apa yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, menurut Thamrin, lebih banyak disebabkan oleh konflik internal partai politik dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat

---

<sup>42</sup>

Lihat *Surat KPUD Padang Pariaman Nomor 312/KPU.PP/V.2005* Tanggal 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Ketua KPUD Padang Pariaman Wiryana Fansuri.

<sup>43</sup>

Lihat *DPRD Padang Pariaman Nomor 171/78/DPRD/V2005* tanggal 18 Mei 2005 yang isinya menyetujui pengunduran Pilkada Padang Pariaman. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman Akhiardi.

masih tetap berpijak kepada Ketetapan KPUD Padang Pariaman bahwa Pilkada Padang Pariaman tetap dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005<sup>44</sup>.

Pernyataan Pj. Gubernur Provinsi Sumatra Barat M. Thamrin kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pj. Gubernur Sumatra Barat M. Thamrin tanggal 7 Juni 2005 dengan Nomor B.270/18/Desk-SB/VI-2005 perihal Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam SK Gubernur itu ditegaskan bahwa Pilkada Padang Pariaman tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Padang Pariaman tanggal 27 Juni 2005. Jadwal Pilkada tidak ada penundaan<sup>45</sup>.

Sikap Gubernur itu juga mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumatra Barat, KPUD Propinsi Sumatera Barat, dan Mendagri M. Ma'ruf. Dukungan agar Pilkada tetap dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005 juga lahir dari kalangan tokoh masyarakat dan wali nagari. Rani Ismail salah seorang tokoh masyarakat Padang Pariaman dan sekaligus Pengurus PKDP mengatakan bahwa tidak ada kusut yang tidak akan selesai. Menurutnya, masalah itu dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam Pilkada hendaknya menjadikan UU sebagai pedomannya. Jangan hanya menggunakan kebenaran dan aturan yang parsial untuk memenangkan kepentingan kelompok. "*Sasek di Ujuang, Baliak Kapangkanyo*" (jika tidak ditemukan penyelesaiannya, kembalilah kepangkalnya)<sup>46</sup>.

Begitupun menurut Koordinator Forum Komunikasi Wali Nagari Kabupaten Padang Pariaman (FKWN) Muhammad Nur, yang mengatakan

---

<sup>44</sup>

Lihat Surat kabar *Padang Ekspres*, tanggal 14 Juni 2005

<sup>45</sup>

Lihat Surat kabar *Singgalang* tanggal 9 Juni 2005.

<sup>46</sup>

Surat kabar *Padang Ekspres*, tanggal 26 Mei 2005.

bahwa seluruh nagari yang ada dalam wilayah Pemerintah Padang Pariaman siap untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. FKWN sangat mendukung sikap KPUD Padang Pariaman yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan<sup>47</sup>.

Ketegasan akan tidak adanya penundaan Pilkada bukan berarti pertikaian politik serta-merta mereda. Pertarungan politik antarkelompok yang bertikai tetap saja berlanjut, baik yang bersifat tertutup maupun terbuka. Pertiakain yang bersifat tertutup dapat dilihat dari teror politik. Teror politik itu biasanya berisikan ancaman yang bersifat fisik melalui alat komunikasi dengan menggunakan telepon atau handphon. Akan tetapi, pada umumnya teror politik itu melalui telepon genggam. Ketua dan anggota KPUD Padang Pariaman sering menerima telepon dan SMS gelap. Isi SMS itu berupa cacian, hinaan, dan ancaman fisik terhadap anggota KPUD Padang Pariaman<sup>48</sup>.

Teror dan ancaman-ancaman politik selama proses Pilkada menjadi sarapan pagi mereka. Setiap kali telpon genggam diaktifkan pada pagi harinya, yang muncul adalah pesan-pesan singkat yang isinya tidak lain adalah terror dan ancaman. Terror itu ada kalanya ditanggapi. Namun, ketika dikontak ke nomor yang bersangkutan, hasilnya tidak jawaban. Sepertinya nomor gelap itu dipakai dan diaktifkan ketika hendak memulai aksinya. Berlajar dari beberapa pengalaman itu, akhirnya Wiryra Fansuri tidak terlalu merespon apa yang

---

<sup>47</sup>

*Wawancara* dengan Muhammad Nur, Koordinator Forum Komunikasi Wali Nagari Padang Pariaman Bulan September 2005 di kediamannya yang bertempat Pauh Kamar. Selain sebagai Wali Nagari Pauh Kamar, M. Nur juga tercatat sebagai Anggota Polri.

<sup>48</sup>

*Wawancara* dengan Wiryra Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, November 2005.

mereka sampaikan melalui pesan gelap itu. Dia menganggap pihak yang melakukan tindakan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab<sup>49</sup>.

Di samping aksi teror antara elite, hal lain yang menarik dalam Pilkada Padang Pariaman adalah aksi teror antara tim sukses dan pendukung antarcalon kepala daerah. Adrisusanto, salah seorang tim sukses pasangan calon kepala daerah Muslim Kasim-Ali Mukhni pernah diteror oleh tim sukses M. Yusuf. Hal itu terjadi karena Adrisusanto dianggap arogan karena tidak bersedia mendukung M. Yusuf yang juga berasal dari nagari dan kecamatan yang sama<sup>50</sup>. Hubungan yang selama ini sangat dekat dan baik yang akhirnya mengalami keretakan adalah sebuah fenomena yang cenderung ditemui selama Pilkada berlangsung. Begitu sebaliknya, dalam Pilkada itu, hubungan yang selama ini renggang dan tidak dekat dalam suasana Pilkada bisa dengan sendirinya menjadi harmonis dan sangat bersahabat.

Dalam suasana tidak berkeruncingan di level elite itu, tahapan kampanye dan pemungutan suara tanggal 27 Juni akhirnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada hari pemungutan suara secara nyata terbukti bahwa kirsuh Pilkada hanya terjadi di kalangan elite partai. Di kalangan masyarakat bawah ternyata tidak ada persoalan. Dapat dikatakan bahwa yang dewasa dalam berpolitik bukanlah elite, melainkan rakyat biasa. Terbukti Pilkada berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan gejolak apapun dalam proses pemungutan suara. Hasil penghitungan suara pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni mendapat dukungan suara terbanyak. Untuk jelasnya lihat tabel berikut ini.

---

49

Wawancara dengan Wiry Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, November 2005.

50

Informasi ini disampaikan oleh Adrisusanto ketika bertemu di sebuah warung di arena Kantor Bupati Padang Pariaman bulan Mei tahun 2006.

### Perolehan Suara Pilkada Padang Pariaman 2005

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	M. Yusuf-Isril Berd	59.839	41,8
2	JJ. Datuk Gadang-Herman Harun	49.805	34,8
3	Muslim Kasim-Ali Mukhni	33.298	23,4
	<b>Jumlah</b>	142.942	100

Sumber: Laporan KPUD Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2005.

Hal yang menarik dari hasil perolehan para suara masing-masing pasangan calon kepala daerah itu adalah mereka menang di nagari asal masing-masing. M. Yusuf mendapat dukungan penuh di Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau dan menang di empat Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. JJ. Datuk. Gadang-Herman Harun menang di daerah asalnya Kecamatan 2x11 Kayutanam. Begitupun Muslim Kasim. Calon *in-cambant* ini juga menang di daerah Pakandangan dan 12 kecamatan lainnya<sup>51</sup>. Menangnya setiap pasangan calon di daerah asal mereka membuktikan kuatnya ikatan emosional kedaerahan seperti yang telah disinggung sebelumnya<sup>52</sup>.

Walaupun KPUD telah menetapkan hasil penghitungan akhir, tetap saja ada kelompok masyarakat yang tidak menerima. DPRD Padang Pariaman tetap tidak dapat menerima keputusan itu. Tanggal 29 Juni 2005 sekelompok masyarakat yang menamakan diri Kelompok Forum Peduli Pilkada mendatangi kantor KPUD Padang Pariaman<sup>53</sup>. Aksi yang dikomandoi oleh *Ci Elok* meminta

---

51

Surat kabar *Padang Ekspres*, tanggal 7 Juli 2005.

52

Surat kabar *Haluan*, tanggal 30 Juni 2005.

53

Surat kabar *Singgalang*, tanggal 30 Juni 2005.

agar dilakukan pemilihan ulang di beberapa TPS di beberapa TPS yang masyarakat tidak dapat memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih<sup>54</sup>.

Selain aksi demonstrasi, gugatan terhadap hasil penghitungan suara KPUD Padang Pariaman yang dimenang oleh pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni muncul dari pasangan M. Yusuf-Isril Berd. Gugatan itu ditujukan kepada KPUD Padang Pariaman dan Muslim Kasim. KPUD digugat karena telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, sedangkan Muslim Kasim digugat karena dugaan *money politic* dan ijazah palsu. Namun hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Pariaman menyatakan menolak gugatan M. Yusuf –Isril Berd, sehingga permohonan itu menjadi gugur<sup>55</sup>.

Selesai masalah gugatan, hasil rekapitulasi penghitungan suara juga menemui masalah politik. DPRD Padang Pariaman tetap tidak mengakui hasil Pilkadal. Setelah tiga hari KPUD menyerahkan penetapan dan berkas rekapitulasi suara, DPRD belum juga menanggapinya guna melantik bupati dan wakil bupati. Ketua maupun wakil ketua, DPRD memang tidak pernah mau menindaklanjutinya. Padahal dalam aturan DPRD hanya diberi waktu tiga hari setelah diberitahu dan berkas-berkasnya diserahkan oleh KPUD.

Titik terang proses pelantikan bupati terpilih diawali dengan terbentuknya Panmus (Panitia Musyawarah) tanggal 30 Agustus 2005. Panmus yang terdiri atas 13 orang anggota DPRD itu dan diketuai oleh Khairuddin berhasil menetapkan keputusan penting bahwa DPRD Padang Pariaman siap menggelar Sidang Istimewa DPRD dengan agenda tunggal, yaitu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tanggal 5

---

<sup>54</sup>

Surat Kabar *Padang Ekspres* dalam 30 Juni 200.

<sup>55</sup>

Lihat Surat Kabar *Padang Ekspres*, 28 Juli 2005.

September 2005<sup>56</sup>. Sesuai dengan rencana tanggal 5 September 2005, atas nama Menteri Dalam Negeri, Gubernur Gamawan Fauzi melantik Muslim Kasim dan Ali Mukhni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk masa jabatan 2005-2010. Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan bahwa walaupun Sidang Istimewa hanya dihadiri dan ditandatangani oleh satu orang, sidang itu tetap sah<sup>57</sup>.

## **PENUTUP**

Bercermin dari peristiwa itu, agaknya benar apa yang dikatakan oleh sejarawan senior Taufik Abdullah bahwa Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut filosofi bahwa konflik merupakan upaya menuju integrasi<sup>58</sup>. Dalam bentuk lain dikatakan bahwa tidak ada yang pecah, maka pecahkan sebuah gelas, piring ataupun mangkok. Hal-hal seperti itu sudah biasa dalam sebuah pesta besar, apalagi dalam tingkat pemilihan bupati dan wakil bupati itu. Jika disadari pola kebudayaan Minangkabau, dari situlah muncul dinamika dalam masyarakat. Dinamika dalam menuju pada konflik untuk mencapai proses integrasi dalam masyarakat. Dalam sebuah petatah Minang dikatan *basilang kayu dalam tunggu, makonyo api bisa ka hiduik*<sup>59</sup>.

## **DAFTAR BACAAN**

---

<sup>56</sup> DPRD Siap Menggelar Sidang Istimewa Lantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih” dalam surat kabar *Haluan*, 1 September 2005.

<sup>57</sup> *Wawancara* dengan Ketua Golkar Padang Pariaman H. Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa, pada 5 Desember 2005.

<sup>58</sup> Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Konflik di Minangkabau dalam Taufik Abdullah, (ed) Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987.

<sup>59</sup>

Ungkapan petatah-petitih itu dapat diartikan perbedaan yang tumbuh dalam masyarakat merupakan hal yang positif untuk menumbuhkan dinamika dan kemajuan bagi kehidupan anak nagari.

## **Arsip dan Dokumen**

*Dokumentasi Foto Pilkada Padang Pariaman Tahun 2005* oleh KPUD Padang Pariaman.

*Laporan KPUD Padang Pariaman, tahun 2005.*

*Notulensi Rapat Paripurna Khusus DPRD Padang Pariaman Tanggal 6 Mei 2005.*

*Surat DPRD Padang Pariaman Nomor 171/78/DPRD/V2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Persetujuan Penundaan Pilkada Padang Pariaman.*

*Surat Gugatan DPC PDIP Padang Pariaman tanggal 20 April 2005.*

*Surat KPUD Padang Pariaman Nomor 312/KPU.PP/V.2005 Tanggal 17 Mei 2005 tentang Persetujuan Penundaan Pilkada*

*Surat Pengaduan dan Tuntutan Para Pengurus Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman oleh KPUD Padang Pariaman.*

*Surat Rekomendasi DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat 7 April 2005.*

*Surat Saran Panwaslu Padang Pariaman tanggal 14 Mei 2005.*

*UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama bagian yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.*

## **Buku**

Wafi, Ali Abdul Wahab, 1986. *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Grafiti Press.

Scott, James, 2001. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta : Yayasan Obor.

Sartono, Kartodirdjo, 1984. *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.

Suryadi, 2005. *Syair Sunur: Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad 19*. Padang: PPIM.

Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Konflik di Minangkabau dalam Taufik Abdullah, (ed) Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987

Zaiyardam Zubir, *Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario Penanggulangannya*. Padang: Penelitian Dasar Dikti, 2004

### **Media Massa**

Surat Kabar *Padang Ekspres*

Surat Kabar *Singgalang*

Surat Kabar *Haluan*

Surat Kabar *Garda Minang*

### **Informan**

Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, tanggal 14 November 2005

Komi Chaniago, Salah Seorang Pengurus PBB Padang Pariaman, Agustus 2004

Darmon, Anggota DPRD Padang Pariaman dari PAN di Pariman November 2005

*Wawancara* dengan Zulkarnain, Tim Sukses Tuanku S. Saamar, Juli 2004

*Wawancara* dengan Andi L. Yusra, Pengurus PBB Kabupaten Padang Pariaman, yang juga anggota DPRD Padang Pariaman (2004-2009) November 2005

*Wawancara* dengan Muhammad Nur, Koordinator Forum Komunikasi Wali Nagari Padang Pariaman Bulan September 2005 di kediamannya yang bertempat Pauh Kamar.

*Wawancara* dengan Adrisusanto tim sukses Muslim Kasim yang berasal dari PBB, bulan Januari 2006

*Wawancara* dengan Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa Ketua Golkar Padang Pariaman tanggal 5 Desember 2005

